

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Sejak tahun 2007 pemerintah sudah melaksanakan PKH sebagai salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara berkembang, terutama masalah kemiskinan kronis.¹

Sebagai salah satu program bantuan sosial bersyarat, PKH memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan disekitarnya terutama ibu mengandung dan anak. Manfaat PKH juga mulai diberlakukan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM diarahkan untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan PKH diarahkan untuk menjadi pusat keunggulan dalam penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.²Millenium

¹Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)* 1.

² Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, 1.

Development Goals (MDGs) memiliki lima komponen tujuan yang akan didorong oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar kesetaraan jender pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan.³

Sasaran PKH adalah keluarga miskin yang memiliki berbagai komponen dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dan juga terdaftar sebagai Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin KPM PKH harus sudah terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Keluarga yang sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH memiliki kewajiban di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, melakukan imunisasi dan timbang anak balita dan anak prasekolah serta pemenuhan gizi yang lengkap. Sedangkan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH memiliki kewajiban dalam bidang pendidikan yaitu mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota PKH ke fasilitas pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesehatan yaitu untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.⁴

b. Dasari Hukumi Pelaksanaani PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan peraturan berikut: ⁵

- 1) Undang-Undang RI Nomor 32, tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang RI Nomor 40, Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

³ Kartiawati, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)" 54.

⁴Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga/Harapan (PKH)*, 2

⁵Sri Lestari Rahayu, "BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA Sekarang dan Ke Depan", (Bandung, FOKUSMEDIA, 2012) 124-125

- 3) Undang-undang RI Nomor 11, Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negeri RI;
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 7) Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8/M tahun 2005;
- 8) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;
- 9) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 38/HUK/2011 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH);
- 10) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 4/HUK/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2011.

c. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:⁶

- 1) Sebagai usaha dalam meningkatkan taraf hidup keluarga dengan meningkatkan akses;

⁶Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, 25-26

- layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan serta mengurangi beban pengeluaran;
 - 3) Mengadakan pengalihan perilaku keluarga penerima manfaat dalam menjalankan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan;
 - 4) Meminimalisir kesenjangan dan kemiskinan; dan
 - 5) Mengenaalkan kepada Keluarga Penerima Manfaat akan fungsi produk dan jasa keuangan formal.

d. Perkembangan Jumlah KPM PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan secara berkelanjutan sejak tahun 2007 di 7 provinsi. Dan sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 512 Kabupaten/Kota dan 7.214 Kecamatan pada tahun 2018.⁷

Gambar 2.1
Perkembangan Jumlah KPM PKH

TAHUN	PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	KPM PKH
2007	7	48	337	387.947
2008	13	70	637	620.848
2009	13	70	781	726.376
2010	20	88	946	774.293
2011	25	119	1.387	1.52.201
2012	33	169	2.001	1.454.655
2013	33	336	3.417	2.326.533
2014	34	418	4.870	2.871.827
2015	34	472	6.080	3.511.088
2016	34	504	6.402	5.981.528
2017	34	509	6.730	6.228.810
2018	34	512	7.214	10.000.000

Sumber : data dari Dinas Sosial

⁷Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum. Program. Keluarga Harapan (PKH)*, (24)

e. Kriteria Komponen PKH

Kriteria komponen Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

- 1) Kriteria Komponen Kesehatan meliputi:
 - (a) Ibu mengandung / menyusui; dan
 - (b) Anak berumur 0-6 tahun
- 2) Kriteria Komponen Pendidikan
 - (a) Siswa sekolah dari SD/MI sederajat sampai SMP/MTs sederajat
 - (b) Siswa SMA/MA atau sederajat
 - (c) Anak usia 6-21 tahun yang belum rampung menyelesaikan wajib sekolah 12 tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial
 - (a) Lansia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - (b) Penyandang disabilitas berat.

f. Hak dan Kewajiban KPM PKH

1) Hak KPM PKH

Beberapa Hak Keluarga Penerima PKH yaitu:⁸

- (a) Mendapat bantuan sosial;
- (b) Pendampingan sosial
- (c) Mendapatkan pelayanan dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan; dan
- (d) Mendapat program bantuan parlementer di bidang pangan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

2) Kewajiban peserta PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal berikut:⁹

- (a) Keluarga peserta PKH diwajibkan melakukan cek kesehatan dan menerima fasilitas kesehatan sesuai protocol kesehatan bagi ibu mengandung/menyusui serta anak berumur 0 (nol) sampai 6 tahun.

⁸Direktorat Perlindungan dan Jaminan.Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan.(PKH)*, 27

⁹Direktorat Perlindungan dan Jaminan.Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, 27-28

- (b) Anggota keluarga mengikuti dan menghadiri kegiatan sekolah minimal 85% dari aktifitas belajar efektif bagi anak sekolah wajib belajar 12 tahun; dan
- (c) Anggota keluarga dengan komponen lansia dan disabilitas wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan social yang sesuai kebutuhan;
- (d) Anggota keluarga menghadiri pertemuan rutin kelompok yang membahas tentang peningkatan kemampuan keluarga atau sering disebut (P2K2).

3) Pemenuhan Kewajiban

Semua anggota penerima PKH memiliki kewajiban dalam memenuhi kepesertaan PKH. Setiap pemenuhan kewajiban yang dilakukan KPM PKH sangat berpengaruh pada bantuan sosial lainnya KPM yang sudah memenuhi kewajibannya bisa mendapati hak sesuai dengan program. Namun, KPM yang sengaja melanggar kewajibannya akan dikenakan penangguhan dan / atau pencabutan bantuan sosial dengan ketentuan sebagai mana yang tercantum dalam tabel 2.1¹⁰

Table 2.1

Ketentuan Penangguhan / penghentian

<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta PKH di tangguhkan bantuannya pada tahap 1, 2, dan 3 apabila tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah ditentukan minimal 1 bulan dalam siklus penyaluran bantuan 2. Penangguhan bantuan social PKH tahap 4 diberlakukan pada tahap 1 tahun berikutnya 3. Peserta PKH menerima kembali bantuan social PKH yang ditangguhkan apabila memenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta PKH diberhentikan kepesertaannya jika tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sebanyak 3
---	--

¹⁰ Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, 28

<p>kewajiban</p>	<p>tahap penyaluran bantuan selama masa kepesertaan</p> <p>2. Peserta PKH yang dihentikan kepesertaannya akan menerima bantuan social PKH yang telah ditanggukhan tahap-tahap sebelumnya</p>
------------------	--

Sumber: data dari Dinas Sosial.

g. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dana PKH dibagikan sesuai dengan penetapan KPM PKH yang mempunyai komponen kepesertaan, memenuhi kewajiban sesuai kriteria PKH dan menghadiri serta mengikuti pertemuan rutin kelompok (P2K2) setiap bulan.¹¹

Berikut ketentuan bantuan PKH akan diberikan:

- 1) Nilai bantuan sesuai ketetapan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat jaminan Sosial Keluarga.
- 2) Bantuan PKH yang diberikan merupakan Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen

¹¹Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)* , 29

- 3) Bantuan tetap yaitu sebagai stimulan yang dibagikan untuk membantu memnuhi kebutuhan dasar KPM.
- 4) Bantuan komponen yaitu bantuan yang dibagikan sesuai dengan komponen KPM PKH, yaitu pendidikan, kesehatan, dan/atau komponen kesejahteraan.
- 5) Jumlah maksimal penerima bantuan yaitu 4 orang dalam satu keluarga.
- 6) Jumlah nilai bantuan bagi poeserta yang ditetapkan tahun berjalan, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- 7) Transfer dana dari Kas Negara kemlembaga bayar dilakukan setiap tahap penyaluran bantuan dengan meksnisme non tunai.

Pelaksanaan pencairan dana bantuan dapat dilihat dari gambar:

Gambar 2.2
Tahapan/siklus Penyaluran

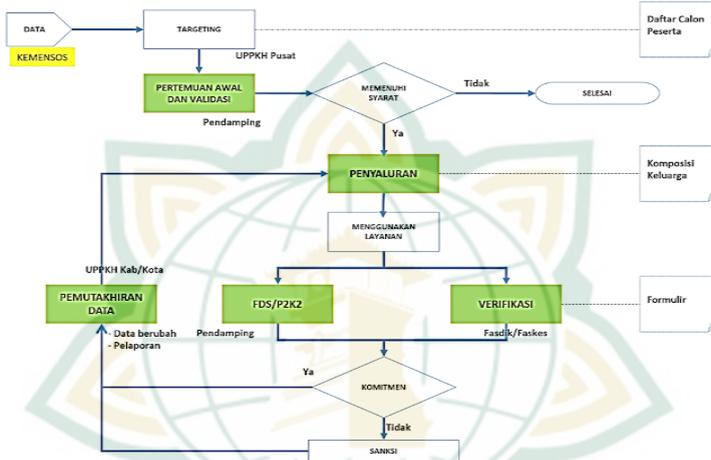


Sumber: data dari Dinas Sosial

h. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan bisa diamati dari gambar di bawah ini : ¹²

Gambar 2.3
Alur Pelaksanaan PKH



Dari gambar di atas menunjukkan bagaimana prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang kemudian dijelaskan secara rinci sebagai berikut.¹³

- 1) Perencanaan
- 2) Penetapan Calon Peserta PKH
- 3) Persiapan Daerah
- 4) Tahap Validasi/ Pertemuan Awal
- 5) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH
- 6) Penyaluran Bantuan PKH Kepada Masyarakat
- 7) Pendampingan
- 8) Mengadakan Rapat untuk Meningkatkan Kemampuan Keluarga
- 9) Verifikasi Komotmen
- 10) Pemutakhiran Data
- 11) Transformasi Kepesertaan
- 12) Pengaduan

¹²Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman umum Program Keluarga Hrapan (PKH)*, 37

¹³Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, 37-50

i. Pendampingan PKH

Agar pencapaian tujuan program cepat tercapai, maka pendampingan untuk PKM PKH sangat penting. Pendamping PKH melaksanakan fungsi fasilitasi, mediasi, serta advokasi untuk KPM PKH saat memanfaatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu pendamping PKH harus memantau KPM PKH menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk merubah perilaku KPM PKH.¹⁴

Berikut ini merupakan ketentuan dilakukannya pendampingan berdasarkan komponen kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial:

- 1) Pendamping PKH setiap bulan harus melaksanakan pertemuan rutin atau P2K2 dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang didampinginya ;
- 2) Pendamping sosial PKH memiliki kewajiban memantau komponen bantuan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sudah tepat sasaran;
- 3) Pendamping untuk komponen lansia dilaksanakan oleh pendamping dari perwakilan Rehabilitas Sosial Lanjut Usia; dan
- 4) Pendamping disabilitas berat dilaksanakan oleh perwakilan Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas.

Dalam pendampingan sosial PKH diperbolehkan membentuk kelompok KPM berdasarkan wilayah yang didampingi. Pembentukan kelompok memiliki tujuan memudahkan pendampingan seperti monitoring, penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH dan sebagainya.

Dalam pembentukan kelompok bisa dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

¹⁴Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, 43-44

- (a) Identifikasi alamat tinggal serta mengamati kapasitas KPM PKH masing-masing;
- (b) Pembentukan KPM beranggotakan 10 sampai 30 orang dengan ketentuan:
 - (1) Pembentukan sesuai tempat tinggal KPM;
 - (2) Membentuk kelompok berdasarkan jenis dan/atau tujuan tertentu;
- (c) Menetapkan tujuan kelompok;
- (d) Menentukan pengurus;
- (e) mendeskripsikan peran dan tugas pengurus kelompok;
- (f) menentukan kebutuhan administrasi kelompok.

2. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kata “kesejahteraan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “sejahtera” yang artinya aman, sentosa, dan makmur, sedangkan kesejahteraan yaitu suatu keadaan yang aman, damai, sentosa, selamat, kesenangan hidup, dan makmur.¹⁵ Dalam bahasa Sanskerta kesejahteraan adalah “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini kesejahteraan adalah orang yang sejahtera atau dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.¹⁶ Jadi kesejahteraan bisa didefinisikan suatu keadaan dimana seseorang atau kelompok orang dapat memenuhi kebutuhannya dan berhubungan baik dengan lingkungannya.

Masyarakat menurut istilah merupakan penafsiran dari Bahasa Inggris yaitu *society* dan *community*. Dalam ilmu komunitas dan pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi kata masyarakat di jelaskan berasal dari konsep *community* atau

¹⁵<https://kbbi.web.id/sejahtera> diakses pada 12 Januari (08.53)

¹⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012) 8.

komunitas. Komunitas adalah suatu kesatuan sosial yang berkumpul dalam kelompok dengan kepentingan bersama baik yang bersifat fungsional ataupun yang mempunyai territorial. Jika para anggota kelompok, baik yang besar maupun kecil, hidup selaras sehingga memberikan rasa bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup utama maka kelompok tersebut disebut komunitas.¹⁷

Menurut Soetomo pengertian masyarakat yaitu sekumpulan orang yang saling interaksi secara terus-menerus sehingga dapat menjalin hubungan sosial yang terpola dan terorganisasi.¹⁸ Sedangkan menurut Edi Soeharto, masyarakat yaitu sekelompok orang yang memiliki rasa yang sama dan bahkan menyatu satu dengan yang lain karena saling berbag identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, rasa saling memiliki dan biasanya berada di satu tempat yang sama.¹⁹

Sedangkan pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Pasa I ayat (1) “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”⁴⁸ Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera yang penuh, baik jasmani , rohaniah maupun sosial dan bukan hanya perbaikan dari keburukan-keburukan sosial tertentu.²⁰

Tahapan kesejahteraan menurut teori Need milik Abraham Maslow, bahwa kesejahteraan sosial

¹⁷ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2014. 1-2.

¹⁸ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 25

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama), 2014, 47

²⁰ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2016). 36.

mencakup beberapa aspek yang harus diperoleh melalui tahapan-tahapan. Tahap pertama yaitu dapat memenuhi kebutuhan fisik atau pokok, contohnya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Tahap kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan akan akses rasa aman, kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial, lalu tahap keempat yaitu adanya pengakuan dari masyarakat sekitar, tahap yang terakhir, tahap kelima adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri.²¹

b. Tujuan Kesejahteraan

Tujuan kesejahteraan dapat diraih melalui beberapa metode dengan tujuan memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dan dapat menyelesaikan suatu masalah penyesuaian diri, terhadap bentuk-bentuk peralihan masyarakat, dengan melalui situasi ekonomi dan sosial.²²

Menurut Friedlander, target utama dari kesejahteraan sosial yaitu untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia yaitu dari aspek kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu kesejahteraan sosial juga berguna untuk memiliki peluang yang sama dengan warga yang lainnya, dan meningkatkan tingkat harga diri setinggi-tingginya, berpikir sehat, dan melakukan segala hal tanpa dibatasi sesuai dengan hak asasi yang dimiliki sesama manusia.²³

Sedangkan menurut Adi Fahrudin, kesejahteraan sosial mempunyai tujuan:²⁴

- 1) Untuk mewujudkan tercapainya standar kehidupan dasar seperti konsumsi, rumah, kesehatan, dan hubungan sosial dengan lingkungan yang harmonis.

²¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 2 (2017), 239, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>.

²² Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 37.

²³ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 40

²⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 10.

- 2) Untuk mewujudkan penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungannya misal dengan menggali sumber-sumber, mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup yang memuaskan.

Menurut Badrudin, teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu classical utilitarianism, neoclassical welfare theory, dan new contraction approach. Classical utilitarianism berfokus pada kepuasan atau kesenangan seseorang bisa diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan individu dapat dibandingkan dan diukur secara kuantitatif. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang tidak memungkinkan pemindahan input maupun output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa melibatkan sedikitnya satu orang atau lebih. New contraction approach yaitu tentang konsep setiap individu memiliki kebebasan maksimal dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya.²⁵

c. **Indicator Kesejahteraan**

Salah satu konsep perhitungan kesejahteraan adalah diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) seseorang untuk hidup secara normal. Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Berikut adalah beberapa indikator kesejahteraan yaitu:²⁶

²⁵ Ayu Andira dkk, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda” eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2018: 1443

²⁶ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2015, 12-18.

1) Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan indikator yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik mengenai ketidaksejahteraan yaitu:²⁷

- (a) Luas bangunan rumah kurang dari 8 m²;
- (b) Lantai bangunan masih terbuat dari tanah, kayu murahan, dan bambu;
- (c) Dinding rumah masih kayu, rumbia, ataupun tembok yang belum diplaster;
- (d) Tidak memiliki fasilitas toilet dan fasilitas buang air besar yang layak;
- (e) Penerangan rumah tidak bersumber dari listrik;
- (f) Sumber air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi, misalnya sungai atau air hujan
- (g) Untuk kegiatan memasak sehari-hari masih menggunakan kayu bakar maupun arang;
- (h) Jarang mengonsumsi daging dan susu dalam seminggu;
- (i) Hanya mampu membeli pakaian setahun sekali;
- (j) Hanya mampu memenuhi kebutuhan makan sekali dalam sehari;
- (k) Tidak mampu membayar fasilitas kesehatan, seperti Poliklinik;
- (l) Sumber penghasilan keluarga adalah pekerja tani, nelayan, pekerja bangunan, buruh kebun, dan yang lainnya dengan penghasilan dibawah Rp. 600.000,- perbulan;
- (m) Pendidikan kepala keluarga masih rendah, misalnya: tidak sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar atau hanya lulusan Sekolah Dasar;
- (n) Tidak memiliki barang berharga yang bisa dijual di saat mendesak dengan nilai Rp.500.000.-.

²⁷Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, 44-45.

2) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga.²⁸

- (a) KeluargaiPra-Sejahtera (sangat miskin), adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.
- (b) Keluarga Sejahtera I (miskin), adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:
 - (1) Secara umum hanya makan dua kali dalam sehari atau lebih;
 - (2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
 - (3) Memiliki tempat tinggal dengan atap, lantai dan dinding yang baik;
 - (4) Mampu membawa anggota keluarga yang sakit ke fasilitas kesehatan;
 - (5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
 - (6) Anak dengan usia sekolah dari 7-15 tahun tidak putus sekolah.
- (c) Tahapan Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 sd 6) dan indikator berikut:
 - (1) Anggota keluarga bisa melakukan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan;
 - (2) Dalam seminggu minimal anggota keluarga makan daging/ikan/telur;
 - (3) Seluruh anggota keluarga minimal menerima sepasang pakaian baru dalam satu tahun;

²⁸Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, 2015, 14-15

- (4) Luas bangunan tempat tinggal minimal 8m² untuk setiap penghuni rumah;
 - (5) Dalam jangka tiga bulan terakhir dalam kondisi sehat, sehingga bisa melakukan tugas/fungsi masing-masing;
 - (6) Ada anggota keluarga yang memiliki penghasilan tetap;
 - (7) Seluruh anggota dengan usia 10-60 tahun melek huruf;
 - (8) Pasangan usia subur melaksanakan KB.
- (d) Tahapan Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator Keluarga Sejahtera II (Indikator 1 sd 14) dan indikator berikut:
- (1) Dalam keluarga mengupayakan pengetahuan agama;
 - (2) Memiliki tabungan dari sebagian pendapatan dalam bentuk barang atau uang;
 - (3) Memiliki kebiasaan minimal sekali seminggu untuk makan bersama dan saling berkomunikasi;
 - (4) Mengikuti kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
 - (5) Keluarga dapat mengakses informasi melalui surat kabar, majalah, radio, tv.
- (e) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 sd 19) dan indikator berikut:
- (1) Keluarga secara rutin dan tulus memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial di lingkungannya;
 - (2) Ada salah satu anggota keluarga yang aktif dalam pengurusan perkumpulan sosial/yayasan/isntitusi.

d. Kesejahteraan dalam Islam

Al-Quran memakai beberapa istilah yang memiliki arti kesejahteraan. Diantaranya adalah “Al-Falah” yang memiliki cakupan luas serta mendalam dalam menggambarkan konsep kesejahteraan sosial dan yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.²⁹

Secara bahasa perkataan “al-falah” berarti keberuntungan, kesuksesan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfani menjelaskan bahwa perkataan al-falah dalam kosa kata al-Qur’an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan al-falah berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Al-Falah dalam lingkungan keduniaan dapat ditandai dengan adanya keberhasilan dalam mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan cara memperoleh semua hal yang memberikan kehidupan lebih baik dan menyenangkan secara berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Sedangkan Al-Falah dalam konteks kehidupan akhirat dibangun atas empat penyangga, yaitu;

- (a) Kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan,
- (b) Berkecukupan tanpa mengalami kefakiran,
- (c) Kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan
- (d) Pengetahuan tanpa mengalami kebodohan,

Sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada kehidupan yang lebih sempurna kecuali kehidupan akhirat, sebagaimana dinyatakan di dalam al-Qur’ani(QS. Al-Ankabut : 64) :³⁰

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَاةُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

²⁹Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*, 1.

³⁰Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*, 1.

Artinya: “dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui” (QS. Al-Ankabut : 64).

Kata (هذه) *hadzihi/ ini* dilihat dari kehidupan di dunia. Kata tersebut sering memberi kesan ketiadaan “harga”, kerendahan nilai, atau penghinaan kepada yang di tunjuk. Bahwa ayat ini menggunakan sedang di sana tidak karena disana telah ada isyarat tentang kerendahan nilai kehidupan duniawi dengan pengakuan orang kafir di hari Kemudian.

Thabathaba’i mamaparkan bahwa kata (لعب) *la’ib* adalah satu kegiatan yang sudah tertata sedemikian rupa tetapi khayali atau tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Kehidupan dunia menurutnya dinamai *la’ib* karena ia akan tetap lenyap dan kemudian hilang, seperti halnya anak-anak berkumpul bermain dan bergembira sesaat, kemudian berpisah dan begitu cepatnya mereka saling berpisah. Kebanyakan tujuan yang direbutkan oleh para penyaing dan dipersaingkan oleh orang-orang zalim adalah persoalan-persoalan yang bersifat sangkaan yang tidak berdasar dan tanpa memiliki wujud yang nyata serta fatamorgana, seperti harta, benda, pasangan, anak-anak, keanekaragaam dalam kedudukan, kepemimpinan, pendukung dan pengikut. Manusia tidak memiliki hal-ahal tersebut kecuali dalam wadah waham dan khayal.

Kata (حيوان) *hayawan* berasal dari kata (احياء) *hayah*, yang artinya *hidup*. Kata yang berpatron seperti kata itu, yakni diakhiri dengan *alif* dan *nun* meneunjukkan kesempurnaan. Dari sini, ia dipahami dalam arti hidup sempurna. Kata ini hanya ditemukan

sekali dalam al-Quran yang digunakan untuk menunjuk kehidupan ukhrawi.³¹

Kesejahteraan adalah tujuan pokok bagi seluruh umat Islam. Kesejahteraan mencakupi kepuasan fisik dan sebab kedamaian mental serta kebahagiaan hanya dapat dicapai secara seimbang antara materi dan rohani dari manusia.³² Kesejahteraan yang ditegaskan al-Qur'an berdiri diatas lima pilar utama, yakni terpenuhinya (1) kebutuhan fisik-psikologis (2) kebutuhan intelektual (3) kebutuhan emosi (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan tersebut memiliki aspek lahir dan batin, dan juga berpegang dengan realitas kehidupan sebagai landasan agar bisa mengembangkan kualitas kehidupan dunia, namun tidak terhenti pada pemenuhan kebutuhan kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi tempat dan waktu. Kualitas hidup yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan yang ditawarkan Al-Quran tercermin pada doa sapu jagat sebagai berikut:³³

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "dan diantara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"(QS. Al-Baqarah : 201).

Dan diantara mereka, yakni manusia yang telah melaksanakan haji atau semua manusia yang sudah, belum, atau tidak melaksanakan haji, ada juga yang menjadikan ibadah haji atau seluruh aktifitasnya mengarah kepada Allah dan selalu mengingat-Nya

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran vol 10*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002) 132-136

³² M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 6.

³³ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, 2.

sehingga ia berdoa “Tuhan kami! Demi kasih sayang dan bimbingan-Mu, anugerahilah kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat.”³⁴

Yang mereka mohonkan bukan segala kesenangan dunia, tetapi yang sifatnya hasanah, yaitu baik, bahkan bukan hanya di dunia tetapi juga memohon hasanah di akhirat. Dan, karena perolehan hasanah belum bisa menghindar keburukan atau karena bisa jadi hasanah itu diperoleh setelah mengalami siksa, mereka menambahkan permohonan mereka dengan berkata “*dan pelihara pulalah kami dari siksa neraka*”

Dasar doa sapujugat tersebut menegaskan kebaikan hidup di dunai sebagai sumber Al-Falah dengan berlandaskan iman serta ibadah merupakan tabungan yang bisa di dimanfaatkan untuk kehidupan di akhirat, sebab dalam sudut pandang islam, dunia adalah tempat untuk menanam, sedangkan akhirat tempat untuk memanen.

Di dalam Al-Quran, masyarakat yang sejahtera disebut *almuflihun*, berarti orang yang beruntung. Indikator masyarakat sejahtera yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, menjalankan sholat, dan memberikan sebagian rezekinya untuk diinfaqkan, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan dan mereka yang meyakini adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, (meraih kesejahteraan dunia dan akhirat). Sebagaimana dalam al-Quran (QS. Al-Baqarah : 4) :³⁵

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ

Artinya: “dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah

³⁴M quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. Vol 1* (Jakarta, Lentera Hati 2002) 531-532

³⁵ Asep/Usman/Ismail, *Al-Qur'an/dan/Kesejahteraan/Sosial*, 2

diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin takan adanya (kehidupan) akhirat.”

Orang-orang yang bertakwa setiap saat juga percaya menyangkut apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, yakni al-Quran dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelum-mu, yakni Taurat, Injil, dan Zabur serta dengan keniscayaan kehidupan hari akhirat seperti adanya perhitungan, surga, neraka mereka sangat yakin.

Kata “sepanjang saat” dipahami dari penggunaan bentuk kata kerja *Mudhari* yakni kata kerja masa kini dan yang akan datang yang digunakan oleh kata (*يؤمنون*) *yu'minun*.

Ayat ini mengutamakan aspek keyakinan, yaitu akhirat, sebelum katalakernya sudah menunjukkan betapa kokoh dan besarnya keperdulian tentangiakhirat, dan bahkan keyakinan akan akhirat sudah menyelimuti segala aktifitasnya. Visi yang mereka miliki adalah visi yang jauh tidak terbatas bukan terbatas padal“di sini” dan “sekarang”.

(*يوقنون*) *yuqinun* yakni keyakinan akan pengetahuan tentang sesuatu bersamaan dengan tersisihnya apa yang mengeruhkan pengetahuan itu, baik itu berupa keranguan maupun dalih dikemukakannya lawan. Itu sebabnya pengetahuan Allah tidak dinamai hingga mencapai tingkatan yakin karena pengetahuan Yang Maha Mengetahui itu sedemikian jelas sehingga tidak pernah sesaat atau sedikitpun disentuh oleh keraguan. Berbeda dengan manusia yang yakin. Sebelum tiba keyakinannya, ia terlebih dahulu disentuh oleh keraguan. Namun ketika ia sampai pada tahap yakin, keraguan yang tadinya ada langsung sirna.³⁶

³⁶M quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. Vol 1* (Jakarta, Lentera Hati 2002) 113-114

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat saling melengkapi, bukannya saling bertentangan. Maka dalam sistem ekonomi Islam berusaha meredam konflik tersebut sehingga dapat mewujudkan kemanfaatan bersama.³⁷ Berdasarkan pandangan Islam tersebut, maka lahirlah nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, yaitu:³⁸

- 1) Keadilan, yaitu nilai yang mengagungkan kebenaran, kejujuran, keberanian serta konsisten pada kebenaran.
- 2) Pertanggungjawaban, untuk memberikan kemakmuran seluruh alam semesta sebagai tugas seorang yang ditunjuk sebagai khalifah. Setiap pemain dalam bidang ekonomi mengemban tanggung jawab untuk selalu berperilaku ekonomi yang baik dan benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum bukannya hanya mensejahterakan diri sendiri atau kelompok tertentu.
- 3) Tafakul atau jaminan sosial, dengan adanya jaminan sosial di masyarakat maka bisa memotifasi terciptanya hubungan baik diantara individu dan masyarakat, sebab dalam islam tidak hanya mengajarkan tentang berhubungan dengan Allah saja tetapi juga hubungan dengan sesama manusia.

Ada tiga kebutuhan dasar yang dapat selalu meningkatkan kesejahteraan manusia dalam hidup dan berusaha untuk menjaga keberlangsungan eksistensi sebagai manusia di dunia ini, yaitu :

³⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 10

³⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013), 63

- 1) Kebutuhan Dharuriyyat atau kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus ada dan yang paling utama untuk dipenuhi.
- 2) Kebutuhan Hajiyyat atau kebutuhan sekunder, kebutuhan ini jika tidak dipenuhi maka tidak berbaya untuk meselamtan, akan tetapi mengalami kesulitan tapi tidak menyebabkan kepunahan atau bisa dikatakan tidak berbahaya. Jadi, perbedaan antara dharuriyyat dan hajiyyat adalah pengaruhnya terhadap keberadaan manusia. Tapi keberadaan keduanya dibutuhkan dan memudahkan kehidupan mukallaf.
- 3) Kebutuhan Tahsiniyyat atau tersier adalah seluruh kebutuhan dan perlindungan yang dibutuhkan untuk membuat kehidupan manusia yang nyaman akan semakin nyaman lagi. Atau dengan kata lain kebutuhan yang membuat manusia berada dalam segala bentuk mudahan, kenyamanan, dan kelapangan.³⁹

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat tergantung dari mata pencaharian dan menjalankan lima tujuan dasar yaitu agama, hidup atau jiwa., keturunan atau keluarga, kekayaan atau harta, dan akal. Dengan memusatkan sesuai dengan tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (masalahatal-dinjawial-dunya)”.⁴⁰ Kesejahteraan sosial dalam prespektif ekonomi Islam adalah semua ajaran islam dalam melihat segala sapek

³⁹ Muhammad/Akbar./Abdurahman./Sandy/Rizki/Febria, *Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 747, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/viewFile/10709/pdf

⁴⁰ Adiwarmar.A..Karim.,*Ekonomi.Mikro.Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 62.

kehidupan. Berdasarkan pandangan Islam rumusan kesejahteraan sosial mencakup:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang. Kesejahteraan ini mencakup dimensi spiritual ataupun materiil dan mencakup individu maupun kelompok sosial.
- 2) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, karena manusia tidak hidup di dunai belaka tetapi juga di akhirat. Istilah tersebut menggambarkan sebuah keadaan sejahtera secara materiil dan sepirtual dalam dunia maupun akhirat yang dalam islam disebut *falah* yang berarti kemuliaan dan kemenangan hidup.

Maka dapat disimpulkan kesejahteraan dalam prespektif Islam adalah tentang hubungan agama dengan kehidupan umat. Dari dasar perspektif itu, maka istilah kesejahteraan umat menyangkut gambaran keagamaan dilihat dari sisi hubungan antara umat islam dengan pemeluk agama islam.

Dari sisi manusia kesejahteraan umat diibaratkan sebagai perkumpulan keagamaan yang mempunyai kebutuhan sosial ekonomi dan polotik atau bisa digambarkan pada satu sisi saling berhubungan dengan lingkungan sosialnya dan sisi lain menciptakan hubungan dengan tuhan sebagai akibat dari makhluk beragama.⁴¹

e. Strategi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Berikut merupakan strategi untuk mengatasi keimiskinan yang bersifat kronis:⁴²

- 1) Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan yaitu suatu usaha untuk memberikan ketentraman dan memantapkan kestabilan ekonomi, sosial dan politik untuk agar

⁴¹MaltufDFitri,DPengelolaanDZakatDProduktifDsebagaiDInstrumenD Peningkatan Kesejahteraan/Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang* – Volume 8, Nomor 1 (2017): 158 <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

⁴²H. Raharjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, 195

kelangsungan pelaksanaan usaha pengentasan kemiskinan terjamin.

- 2) Strategi kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk miskin melalui kegiatan yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin.
- 3) Strategi kebijakan keluarga berencana (KB) yang diterapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga miskin dengan arahan yang efektif.
- 4) Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan terus-menerus, bertahap dan terpadu berdasarkan pada kemandirian penduduk miskin untuk memenuhi kehidupannya sendiri melalui perbaikan akses kesehatan, pendidikan, dan pelatihan dasar.
- 5) Strategi kebijakan dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin yang diarahkan kepada perbaikan akses pembiayaan, sumber daya, sosial ekonomi, lembaga sosial dan lainnya yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Tiga strategi yang digunakan Bank Dunia untuk mengatasi kemiskinan, yaitu:⁴³

- 1) Menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan mengintroduksikan system intensif yang dapat mendorong penggunaan sumber daya yang ada, termasuk tenaga kerja dari penduduk miskin.
- 2) Upaya yang lebih intensif untuk menyediakan pelayanan social serta pendidikan, kesehatan, nutrisi keluarga berencana.
- 3) Bantuan khusus bagi mereka yang tidak dapat meningkatkan dirinya sendiri seperti

⁴³H. Raharjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, 196

penyandang cacat miskin, golongan lansia atau lanjut usia (miskin structural).

Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, yaitu mendelegasikan proses pengambilan keputusan tanggung jawab dan kewenangan sedekat mungkin dengan kelompok sasaran. Pemerintah Daerah (Pemda) berperan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi semua kegiatan pengentasan kemiskinan dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kebijakan di daerahnya. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus pula memberikan kepercayaan kepada masyarakat, yaitu kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat luas.

B. Penelitian Terdahulu

Penting untuk diketahui bahwa penelitian dengan tema senada juga pernah dilakukan para peneliti terdahulu. Hal ini akan menunjukkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Kartiawati	Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung	Diperoleh kesimpulan bahwa program yang dibentuk belum efektif dalam menentukan sasaran penerima PKH dan dalam mengalokasikan dana PKH oleh penerima PKH. Dana PKH yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna sangat tidak sesuai dengan tujuan dalam program PKH akibatnya

		Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)	PKH tidak dapat belum mampu mengurangi kemiskinan yang ada di Kampung Bonglai.
	<p>Persamaan:dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki persamaan yaitu menganalisis Program Keluarga Harapan dalam prespektif Ekonomi Islam</p> <p>Perbedaan:dalam penelitian terdahulu hanya membahas tentang pengentasan kemiskinan saja, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya membahas pengentasan kemiskinan tapi juga membahas peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup dalam prespektif ekomomi islam.</p>		
2.	Farida Umaroh dan Sri Sutjiatmi	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal	Menjelsakan bahwa program PKH ini belum efektif dikarenakan masih di temukan kurang tepat sasaran dalam penentuan pesrta PKH dan juga ada beberapa peserta PKH yang tidak menggunakan dana PKH untuk keperluan lain yang seharusnya di gunakan untuk keperluan sekolah anak. Tatapi dalam komitmen peserta PKH terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan cukup komit karena para pesrta mengetahui resiko ataupun sanksi yang diperoleh.
	<p>Persamaan:dalam penelitian terdahulu dan yang akan di lakukan sekarang memiliki persamaan dalam membahas</p>		

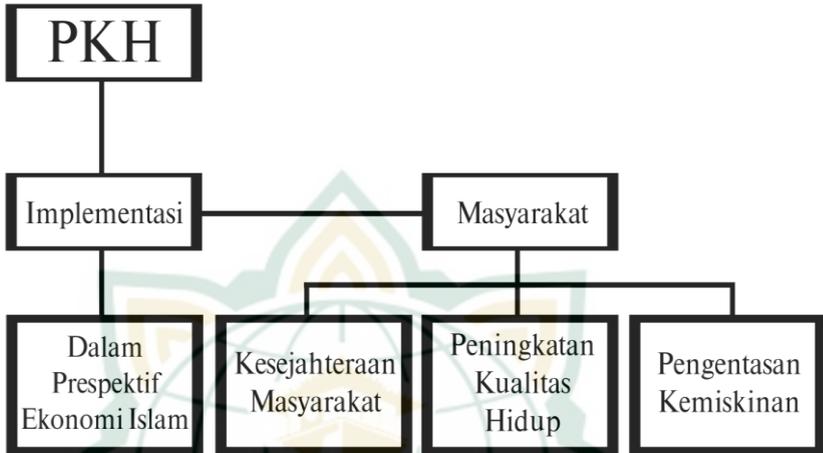
	<p>efektifitas Program Keluarga Harapan dalam prespektif Ekonomi Islam dan juga membahas meningkatkan kesejahteraan</p> <p>Perbedaan: dalam penelitian terdahulu hanya membahas tentang meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan dalam penelitian yang akan di lakukan sekarang juga membahas kualitas hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan</p>		
<p>3.</p>	<p>Dedy Utomo, dkk</p>	<p>Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)</p>	<p>Mengungkapkan bahwa pelaksanaan program keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup RTSM maka dapat disimpulkan bahwa target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dikecamatan Purwosari yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita. Hasil evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH mau melakukan dan memenuhi komitmennya dikarenakan takut dengan adanya sanksi yang diberikan. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahunnya peserta PKH mengalami</p>

			penurunan. Terbukti dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari 692 pada tahun 2009 dan menurun dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2013 ini dengan jumlah 528
<p>Persamaan: dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki persamaan yaitu membahas Program Keluarga Harapan dan membahas kualitas Hidup Masyarakat</p> <p>Perbedaan: dalam penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan sekarang memiliki perbedaan hanya membahas tentang kualitas hidup masyarakat sedangkan dalam penelitian sekarang juga membahas tentang kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, dalam penelitian terdahulu hanya membahas PKH secara umum namun di penelitian ini juga membahas PKH dalam prespektif Ekonomi Islam.</p>			
4.	Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)	Telah disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mensyaratkan peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan secara optimal. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahun jumlah peserta PKH di Desa Beji mengalami penurunan. Terbukti dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari 158 pada tahun

			<p>2007 dan menurun dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2014 ini dengan jumlah 130. Hal ini membuktikan dengan adanya bantuan PKH tersebut setidaknya akan mengurangi angka kemiskinan.</p>
	<p>Persamaan: dalam penelitian terdahulu dan yang akan dilaksanakan sekarang memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas implementasi Program Keluarga Harapan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>Perbedaan: dalam penelitian yang akan dilakukan sekarang tidak hanya membahas kesejahteraan masyarakat namun juga membahas kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan, selain itu juga dalam penelitian ini membahas juga Implementasi PKH dalam Perspektif Ekonomi Islam.</p>		
5.	<p>Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto</p>	<p>Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto</p>	<p>Dalam penelitian ini mengungkapkan tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Adanya pelanggaran pendamping yang mempunyai pekerjaan lain (double job) selain pendamping dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukkan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang</p>

			<p>mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah. Tujuan dari pelaksanaan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk dan ibu meninggal karena melahirkan, serta masih rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan.</p>
<p>Persamaan:dalam penelitian terdahulu dan sekarang memiliki persamaan dalam membahas Program Keluarga Harapan dan Menanggulangi kemiskinan/Pengentasan kemiskinan</p> <p>Perbedaan:dalam penelitian terdahulu hanya membahas menanggulangi Kemiskinan saja sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan sekarang juga membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan juga perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu hanya membahas PKH secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang membahas PKH dalam perspektif ekonomi Islam.</p>			

C. Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Naskah wawancara dengan pendamping PKH
 - a. Menurut anda, apakah PKH (Program Keluarga Harapan) sudah merata untuk masyarakat miskin di Desa Mlaten?
 - b. Apakah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa Mlaten sudah sesuai dengan jumlah yang sudah pemerintah tetapkan dan apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan pemerintah?
 - c. Apakah dari pemerintah akan ada penambahan kuota PKH (Program Keluarga Harapan) untuk Desa Mlaten khususnya?
 - d. Apakah menurut anda, PKH (Program Keluarga Harapan) sudah mensejahterakan masyarakat miskin Desa Mlaten?
 - e. Bagaimana peran PKH (Program Keluarga Harapan) dalam mensejahterakan masyarakat?
 - f. Bagaimana peran PKH (Program Keluarga Harapan) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
 - g. Apakah anda selaku pendamping PKH Desa Mlaten selalu melakukan pendampingan dengan baik?
 - h. Apakah anda selaku pendamping PKH mengadakan pertemuan dengan peserta PKH Desa Mlaten dengan rutin?

- i. Apakah penerima PKH turut menghadiri pertemuan dengan rutin?
 - j. Adakah kendala yang anda hadapi selama menjadi pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)? Jika ada, kendala apa yang anda hadapi?
 - k. Apa saran anda terhadap pemerintah terhadap PKH (Program Keluarga Harapan) yang sudah anda dampingi selama ini?
 - l. Apakah menurut anda, PKH harus dilanjutkan?
2. Naskah wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH
- a. Dari manakah ibu mendapat informasi bahwa ibu sebagai penerima PKH?
 - b. Apakah pendamping PKH selalu mendampingi dengan baik?
 - c. Apakah pendamping PKH mengadakan pertemuan dengan rutin?
 - d. Apakah ibu turut menghadiri pertemuan dengan rutin?
 - e. Apakah sebelum pelaksanaan PKH diadakan sosialisasi oleh petugas/pemerintah desa?
 - f. Apakah setelah adanya sosialisasi ibu dapat mengerti tujuan, kewajiban serta hak-hak ibu sebagai peserta PKH?
 - g. Apakah syarat-syarat yang telah ditentukan memberatkan ibu sebagai peserta PKH?
 - h. Apakah ibu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan?
 - i. Apakah tahap pencairan dana di cairkan tepat waktu?
 - j. Apakah dana PKH yang diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan?
 - k. Apakah ada pemotongan jumlah dana dari pihak tertentu?
 - l. Apakah dana yang ibu terima ibu gunakan untuk kebutuhan lain selain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat?

- m. Apakah setelah menjadi anggota PKH kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat terpenuhi?
- n. Apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah menjadi anggota PKH?
- o. Apa dampak yang ibu rasakan setelah mendapat bantuan PKH?
- p. Berdasarkan pandangan ibu, apakah PKH sudah merata untuk masyarakat Desa Mlaten?
- q. Berdasarkan pandangan ibu, apakah peserta PKH Desa Mlaten sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah?
- r. Apakah PKH sudah memberikan dampak baik untuk keluarga ibu?
- s. Menurut Ibu, apakah perbedaan yang ibu rasakan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PKH?
- t. Apakah PKH perlu dilanjutkan?